

REFORMASI BIROKRASI KEUANGAN: KAJIAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Gresik)

Indah Khairatun Nisa¹, Hastanti Agustin Rahayu²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : indahkhairatunnisa2@gmail.com¹, hastanti.rahayu@uinsa.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Gresik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi selama 3 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Gresik telah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam aspek transparansi melalui penyajian informasi keuangan secara terbuka, akuntabilitas melalui sistem pertanggungjawaban terstruktur, serta efektivitas dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sistem informasi, partisipasi masyarakat yang belum optimal, dan kendala koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan peningkatan partisipasi publik untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah, BPPKAD

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of good governance in regional financial management at BPPKAD Gresik Regency. Using a descriptive qualitative approach, the research was conducted through in-depth interviews, participant observation, and documentation study over 3 months. The results show that BPPKAD Gresik Regency has implemented good governance principles in transparency aspects through open financial information presentation, accountability through structured responsibility systems, and effectiveness and efficiency through information technology utilization. However, several challenges remain, such as limited information systems, suboptimal public participation, and inter-agency coordination constraints. This study recommends strengthening human resource capacity, developing integrated information systems, and increasing public participation to achieve better regional financial governance.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

<p>Keywords: <i>Bureaucratic Reform, Good Governance, Regional Financial Management, BPPKAD</i></p>	
--	--

PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan publik atas reformasi di sektor publik, perbaikan birokrasi telah diupayakan sebagai jawaban terhadap kebutuhan publik dalam meningkatkan kinerja di sektor publik, terutama pada kinerja pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan sebuah gerakan yang diciptakan oleh pemerintah dalam menghilangkan hambatan reformasi yang tidak efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola yang lebih baik dan akuntabel (Rohman & Willy, 2019). Reformasi birokrasi mencakup penerapan prinsip *good governance*, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, penegakan hukum, efisiensi, dan efektifitas. Dalam pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi dirancang untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya keuangan, memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dikelola secara efisien dan efektif, serta menjamin bahwa pelayanan keuangan yang diberikan tidak hanya efisien dan cepat, tetapi juga solutif terhadap permasalahan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pada keuangan milik daerah (Latif, 2019). Menurut Halim (2012), pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban dan hak yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal yang dapat dijadikan sebagai kekayaan dan pendapatan daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting atas berjalannya pembangunan yang berkelanjutan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat mendukung berjalannya program pemerintah, peningkatan kualitas pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, *good governance* harus diterapkan dalam setiap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penerapannya, BPPKAD Kabupaten Gresik sebagai pengelola keuangan daerah di Kabupaten Gresik menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Tantangan tersebut berupa belum maksimalnya kinerja, sistem pengawasan internal yang perlu diperkuat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, masih terdapat kendala dalam upaya memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. berdasarkan hal tersebut, *good governance* merupakan solusi dari permasalahan yang muncul pada pengelolaan keuangan daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik

Implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, mengingat pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi keuangan yang lebih baik di BPPKAD Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail fenomena reformasi birokrasi keuangan yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPPKAD Kabupaten Gresik merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan sedang dalam proses implementasi good governance. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf BPPKAD Kabupaten Gresik, observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan daerah, serta dokumentasi kegiatan pengelolaan keuangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan BPPKAD Kabupaten Gresik, literature review dari penelitian terdahulu, serta data statistik dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala BPPKAD, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Kepala Sub Bidang terkait, dan staf pelaksana. Observasi partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan keuangan daerah, mencatat implementasi prinsip-prinsip good governance, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam reformasi birokrasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen kebijakan, menelaah laporan keuangan, dan mengkaji dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum dan memilih data yang relevan, mengidentifikasi tema-tema utama, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, membuat bagan dan tabel pendukung, serta mengorganisasikan data untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan verifikasi data, merumuskan temuan penelitian, dan mengaitkan dengan teori dan konsep yang relevan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai informan. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan memverifikasi konsistensi temuan. Member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil penelitian kepada informan dan memastikan akurasi interpretasi data.

Tahapan penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun proposal penelitian, mengurus perizinan, dan menyiapkan instrumen penelitian. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan validasi temuan. Sedangkan tahap pelaporan terdiri dari penyusunan laporan penelitian, presentasi hasil, dan publikasi penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan informan, meminta persetujuan untuk melakukan wawancara dan observasi, serta menjaga objektivitas dalam menginterpretasikan data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini dilaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

BPPKAD Kabupaten Gresik merupakan instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai pengelola keuangan daerah, BPPKAD Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik melalui implementasi prinsip-prinsip good governance. Dalam pelaksanaannya, implementasi good governance menjadi sebuah tantangan tersendiri yang membutuhkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Implementasi prinsip transparansi di BPPKAD Kabupaten Gresik telah dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti penyajian informasi keuangan daerah secara terbuka melalui website resmi dan media informasi publik lainnya. Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum optimalnya sistem informasi keuangan daerah dan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan.

Dalam aspek akuntabilitas, BPPKAD Kabupaten Gresik telah menerapkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang terstruktur melalui penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan seperti keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan temuan audit yang berulang akibat keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan meskipun BPPKAD Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai upaya seperti pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan penerimaan masukan serta kritik dari masyarakat. Forum diskusi publik terkait pengelolaan keuangan daerah juga telah diselenggarakan namun tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal.

Implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi tercermin dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan optimalisasi penggunaan anggaran. BPPKAD Kabupaten Gresik juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan penggunaan sumber daya yang efisien. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui pengembangan sistem yang lebih terintegrasi.

Tantangan internal yang dihadapi dalam implementasi good governance meliputi keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti sistem informasi yang belum terintegrasi dan sarana prasarana yang kurang memadai. Sedangkan tantangan eksternal mencakup koordinasi antar lembaga yang belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan evaluasi implementasi, telah terdapat beberapa capaian positif seperti peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan perbaikan sistem akuntabilitas. Namun masih terdapat kendala yang perlu diatasi seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem informasi terintegrasi, dan peningkatan partisipasi publik melalui sosialisasi dan edukasi.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain penguatan kebijakan melalui penyempurnaan regulasi dan harmonisasi kebijakan, pengembangan sistem melalui modernisasi sistem informasi dan integrasi database, serta pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi publik dan penguatan forum partisipasi. Implementasi rekomendasi tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Keberhasilan implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dan dukungan dari berbagai pihak. Diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

KESIMPULAN

BPPKAD Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, terlihat adanya peningkatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari tersedianya akses informasi keuangan melalui website resmi, penerapan sistem pertanggungjawaban yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sistem informasi, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta kendala dalam koordinasi antar lembaga. Upaya perbaikan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan tata kelola yang lebih baik di masa mendatang.

KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam implementasi good governance di BPPKAD Kabupaten Gresik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan utama meliputi aspek sumber daya manusia, di mana masih terdapat kesenjangan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Infrastruktur teknologi yang belum memadai juga menjadi kendala dalam optimalisasi sistem informasi keuangan daerah. Selain itu, keterbatasan anggaran dan

koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut mempengaruhi efektivitas implementasi good governance. Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar BPPKAD Kabupaten Gresik melakukan penguatan kapasitas SDM melalui program pelatihan berkelanjutan, meningkatkan investasi dalam pengembangan sistem informasi terintegrasi, serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan program edukasi publik dan penguatan forum partisipasi masyarakat juga menjadi penting untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Implementasi saran-saran ini perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan sumber daya yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak sehingga penelitian penerapan *good governance* di BPPKAD Kabupaten Gresik berjalan dengan baik, khususnya kepada seluruh kepala bidang BPPKAD Kabupaten Gresik yang telah mengizinkan dan membantu penelitian ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

REFERENSI

- Fajri, Rahmi, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. 2019. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(7): 1099–1104.
- Fauziah, S. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan IT CENTER di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru. *Journal As Siyasa*, 4(2), 63–65.
- Latif, Drs. Arsan. 2019. "Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah." *Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri*: 121.
- Lucy, Aditya, dan Husaini Lismawati. 2021. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Indonesian Journal of Business*
- Meke, Konstantinus Denny Pareira, Richardo Barry Astro, dan Maimunah H. Daud. 2021. "Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4(1): 675–85.
- Novitasari, Dwi. 2022. Salemba Empat *Manajemen Operasi: Konsep dan Esensi*.
- Qomariyah, Nurul. 2018. "Pelanggaran Etika Bisnis (Kajian Kasus-Kasus Pelanggaran Bisnis di Indonesia)." *Manajemen & Bisnis Jurnal* 4(2): 45–53.
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Sagara, Yusar. 2017. 6 Jurnal Sains dan Seni ITS *SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN*. 1 ed. ed. Rosa Adelina. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61220/1/21>. Buku Referensi Sistem Pengendalian Manajemen.pdf.
- Sangki, Adiando Asdi, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan. 2017. "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1(1): 12.

- Sumatri, Zulfikar Bintang Palaguna. 2018. "Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blitar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 07(1): 1–15.
- Tojeng, Muh. Affan R. 2017. "Buku Panduan Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi." : 46. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/08/ppkk_pt.pdf.